



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Triwulan III Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2017. Dalam laporan kinerja Triwulan III TA. 2017 disusn hasil capaian sesuai dengan Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Umum dan Biro Informasi dan Hukum sampai akhir triwulan III Tahun Anggaran 2017.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan; sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2017  
**Sekretariat Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman**

**Agus Purwoto**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. Organisasi dan Personalia .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Sistematika Penyajian .....</b>	<b>3</b>
<b>II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Visi dan Misi .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Target Kinerja .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2.1. Sasaran Program (SP) 1: .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.2. Sasaran Program (SP) 2: .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2.3. Sasaran Program (SP) 3: .....</b>	<b>10</b>
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Capaian Kinerja .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1. Sasaran Program 1 .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1.2. Sasaran Program 2 .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.3. Sasaran Program 3 .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>19</b>
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>23</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman .....	7
Tabel 2. Indikator Kinerja 5 (SP 2) .....	9
Tabel 3. Rincian Indikator Kinerja 7 (SP 3).....	10
Tabel 4. Indikator Kinerja 8 (SP 3) .....	10
Tabel 5. Indikator Kinerja 9 (SP 3) .....	11
Tabel 6. Capaian Kinerja Setmenko Triwulan 1 TA. 2017.....	13
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja 1 SP2 .....	14
Tabel 8. Capaian Kinerja SP 2 Setmenko Triwulan I TA. 2017.....	15
Tabel 9. Sarana Perkantoran.....	16
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan 1 Sekretariat Kemenko Kemaritiman.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman .....	3
Gambar 2. Grafik Jumlah Pemberitaan Bidang Kemaritiman.....	17



## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas untuk tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, selama triwulan III tahun anggaran 2017 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sehingga dapat target kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada semester pertama tahun 2016, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan protokol, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan.



### 1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kementerian Koordinator;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Sekretariat Kementerian Koordinator;
4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

### 1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian.
2. **Biro Informasi dan Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi, serta penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi.
3. **Biro Umum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan



kepegawaian; serta mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kematriman

### 1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sampai akhir triwulan III Tahun 2017. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana atau target kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sampai akhir triwulan III tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Bab. I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.

**Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program untuk triwulan III tahun 2017.



**Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai akhir triwulan III tahun 2017, kendala, dan rekomendasi.

**Bab IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sampai akhir triwulan III tahun 2017 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.



## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi

Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019, Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis ke 5 Kemenko Bidang Kemaritiman yang berbunyi “*Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman*” merupakan sasaran strategis yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan Permenko No. 1 tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan pasal 8 Permenko No. 1 tahun 2015 memiliki fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, dan:
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah selesai disusun dan ditetapkan dengan SK Sesmenko Nomor: SKEP.11/SESMENKO/MARITIM/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Dari Renstra tersebut dapat dijabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman, seperti berikut:

**Visi:** Pelayanan dan koordinasi yang berkualitas, efektif dan terintegrasi dalam mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

**Misi:**

1. Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Kementerian
2. Pembinaan dukungan sumberdaya Kementerian
3. Pembinaan dan koordinasi akuntabilitas kinerja Kementerian.

**Tujuan:**

1. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya yang baik di Kementerian Koordinator
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator.

**Sasaran:**

1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan, melalui Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang handal di Kementerian Koordinator melalui:
  - a. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
  - b. Peningkatan keandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
  - c. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
  - d. Penerapan pengelolaan sumber daya berbasis IT
  - e. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional
3. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator melalui:
4. Peningkatan Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman
5. Peningkatan Penerapan RB di 8 Area Perubahan
6. peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan pencapaian sasaran-sasaran di atas, penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel, dan pengelolaan reformasi birokrasi, yang terkoordinasi dengan baik ;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum, dan kehumasan yang optimal;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan dengan baik; dan
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

## 2.2. Target Kinerja

Pada tahun 2017, Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang belum ditandatangani, karena sampai laporan ini disusun belum mempunyai pejabat definitif. Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan



kemampuan personil dan anggaran yang ada. Adapun rincian target kinerja (sasaran program) dari sasaran strategi yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2017	Target Triwulan 3
1	Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan	1	Persentase Penerapan Standar Pelayanan kesekretariatan	75%	70%
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang handal di Kementerian Koordinator	2	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50%	-
		3	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN	100%	-
		4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai	95%	95%
		5	Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	100%	-
		6	Jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional	800	600
3	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator	7	Persentase Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman	100%	-
		8	Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	35
		9	Persentase Komponen Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan	60%	-

Berdasarkan Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2017 seperti tercantum di atas, kemudian disusun Sub IKU dari masing-masing sasaran program dan IKU tersebut. Berdasarkan sasaran program dan IKU tahunan, kemudian untuk target kinerja pada triwulan III ditetapkan seperti berikut ini:

### 2.2.1. Sasaran Program (SP) 1:

#### Terwujudnya Pelayanan Prima Kesekretariatan.

Sasaran Program 1 ini hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase Penerapan Standar Pelayanan kesekretariatan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 70% dari 15 jenis layanan kesekretariatan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Adapun rincian indikator kinerja ini terdiri dari 15 target sub indikator seperti yang tercantum berikut ini:



Tabel 2. Target Jenis Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No	Jenis Layanan	No	Jenis Layanan
1	Layanan Kepegawaian	9	Layanan Pengelolaan Anggaran
2	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	10	Layanan Persidangan
3	Layanan Kerumahtanggaan	11	Layanan Kehumasan
4	Layanan Persuratan dan Kearsipan	12	Layanan Pengelolaan keuangan
5	Layanan Protokoler	13	Layanan Pengaduan masyarakat
6	Layanan Administrasi Hukum	14	Layanan Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
7	Layanan Sistem Informasi	15	Layanan Pengamanan Dalam.
8	Layanan Administrasi Kerjasama		

### 2.2.2. Sasaran Program (SP) 2:

#### **Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Keuangan, BMN serta Hukum dan Kelembagaan yang Handal di Kementerian Koordinator**

Sasaran Program ini mempunyai beberapa 5 (lima) indikator kinerja (IKU) seperti dalam tabel-tabel berikut ini:

#### **1. Indikator Kinerja 2: Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi**

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, yang meliputi *Soft Competency* (kompetensi personal, bakat), *Hard Competency* (kompetensi keahlian/teknis), dan *Attitude* (perilaku). Penghitungan standar ini akan dilakukan setelah standar kompetensi sudah ditetapkan oleh Menko Kemaritiman.

IKU ini ditargetkan pada akhir tahun 2017, dengan target 50% pegawai di Kemenko Bidang Kemaritiman yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

#### **2. Indikator Kinerja 3: Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN**

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi tentang temuan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (APIP) yang ditindaklanjuti (dilaksanakan) oleh Biro Umum. Untuk indikator ini target yang ditetapkan adalah 100%.

#### **3. Indikator Kinerja 4: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai**



Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung membandingkan jumlah sarana dan prasarana standar yang ada dengan jumlah sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan jenjang jabatan untuk menunjang aktifitas pekerjaan/kedinasan. Target pada triwulan III tahun 2017 adalah sebesar 95%. Adapun rincian sarana dan prasarana yang menjadi dasar perhitungan target IKU ini adalah terdiri dari: ruang kerja, kendaraan dinas, meja-kursi, lemari-bufet, komputer, laptop/notebook, printer, scanner, telepon, mesin fotokopi, dan proyektor.

#### 4. Indikator Kinerja 5: Persentase Pengelolaan Sumber Daya Berbasis IT

Indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan pengelolaan sumberdaya (operasional dan dukungan penyelenggaraan layanan perkantoran) yang berbasis (menggunakan) teknologi informasi (IT) yang sudah dijalankan berbanding yang ditargetkan. Pada triwulan III tahun 2017, IKU ini tidak ditargetkan pencapaiannya. Target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 100%, dengan rincian SUB IKU seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja 5 (SP 2)

No	Indikator Kinerja Program/ Outcome	No	Indikator Kinerja Program/ Outcome
1	Pengelolaan Pelaporan	8	Pengelolaan Data dan informasi
2	Sistem perencanaan/ <i>e-Planning</i>	9	Pengelolaan Opini publik dan kehumasan
3	Pengelolaan Program dan Anggaran	10	Pengelolaan dan Pengukuran Data Kinerja
4	Pengelolaan Keuangan	11	Pengelolaan Ruang rapat
5	Pengelolaan BMN	12	Pengelolaan Administrasi Hukum
6	Pengelolaan Kepegawaian	13	Pengelolaan Dukungan Kebijakan Strategis
7	Pengelolaan Persuratan dan kearsipan		

#### 5. Indikator Kinerja 6: Jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional

Capaian indikator kinerja dihitung dengan menghitung jumlah pemberitaan di media massa baik nasional maupun internasional yang memuat materi yang berkaitan dengan Bidang Kemaritiman selama triwulan II tahun 2017 baik media cetak maupun media elektronik. Target yang diharapkan tercapai pada tahun 2017 adalah 800 kali pemberitaan. Sementara Target pada triwulan II adalah 600 pemberitaan.



### 2.2.3. Sasaran Program (SP) 3:

#### **Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator**

Sasaran Program ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang dijelaskan berikut ini:

#### **1. Indikator Kinerja 7: Persentase Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman**

Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan jumlah unit kerja eselon I lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sudah menerapkan pelaksanaan SAKIP. IKU ini ditargetkan pada akhir tahun 2017, dengan target yang diharapkan tercapai adalah sebesar 100% dengan basis pengukuran semua unit eselon I sudah melaksanakan SAKIP secara penuh pada akhir tahun 2017. Untuk triwulan III indikator kinerja ini belum ditargetkan terealisasi.

Tabel 2. Rincian Komponen Indikator Kinerja 7 (SP 3)

No	Uraian
1	Penyusunan Rencana Strategis
2	Perjanjian Kinerja (PK)
3	Pengukuran Kinerja
4	Pengelolaan Data Kinerja
5	Laporan Tahunan 2016
6	Laporan Kinerja 2016
7	Laporan Triwulanan 2017
10	Evaluasi dan Reviu

#### **2. Indikator Kinerja 8: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang meliputi 8 area perubahan (tabel berikut). Sebagai Kementerian baru, maka target yang diharapkan tercapai pada tahun 2017 hanya sebesar 35, yang ditargetkan dicapai (hasil penilaian APIP) pada triwulan ketiga.

Tabel 3. Rincian Komponen Indikator Kinerja 8 (SP 3)

No	Uraian
1	Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)



2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi
4	Penataan Tatalaksana
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
6	Penguatan Akuntabilitas
7	Penguatan Pengawasan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### 3. Indikator Kinerja 9: Persentase Komponen Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 12 komponen seperti dalam tabel di bawah. Sebagai Kementerian baru, maka target yang diharapkan tercapai pada tahun 2017 hanya sebesar 60 yang ditargetkan pada akhir tahun. Untuk tahun-tahun mendatang target penilaian akan semakin ditingkatkan.

Tabel 4. Komponen Indikator Kinerja 9 (SP 3)

No	Uraian
1	Penyerapan Anggaran
2	Pengelolaan Uang Persediaan
3	Penyelesaian Tagihan
4	Deviasi Halaman III Daftar Pelaksanaan Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
5	Penyampaian Data Kontrak
6	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
7	Revisi DIPA
8	Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)
9	Dispensasi SPM
10	Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
11	Retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D)
12	Pagu Minus

Pada penilaian capaian kinerja ini, dengan tujuan agar masing-masing perencana/pelaksana kegiatan dapat merencanakan kinerja dengan baik dan



mendekati (sedapat mungkin) nilai capaian maksimal yang bisa direalisasikan sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka dilakukan pembatasan perhitungan realisasi kinerja sebesar maksimal 120%. Sehingga jika nilai capaian lebih dari 120%, maka akan tetap dihitung 120%.



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

#### 3.1. Capaian Kinerja

Tabel 5. Capaian Kinerja Setmenko Triwulan 2 TA. 2017

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan	1. Persentase Penerapan Standar Pelayanan kesekretariatan	70	66,67	95,24
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang handal di Kementerian Koordinator	2. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-
	3. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN	-	-	-
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai	95	96,14	101,20
	5. Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	-	-	-
	6. Jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional	600	2.490	120
3. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja kementerian Koordinator	7. Persentase Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman	-	-	-
	8. Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	70,07	120
	9. Persentase Komponen Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan	-	-	-
<b>Total Capaian</b>				<b>108,61</b>

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:



### 3.1.1. Sasaran Program 1

#### 1. Persentase Penerapan Standar Pelayanan Kesekretariatan

Capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Program 1 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman triwulan III tahun 2017 yang berupa IKU.1 Persentase Penerapan Standar Pelayanan Kesekretariatan adalah 66,67% atau mencapai 95,24% dari target. Perhitungan tersebut berdasarkan tercapainya 10 layanan dari 15 layanan kesekretariatan yang ditargetkan tersedia di Kemenko Kemaritiman. Secara rinci target dan capaian kinerja SP1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja 1 (IKU.1) SP2

No	Jenis Layanan	Penerapan Layanan Standar*		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Layanan Kepegawaian	V		Kemenko Maritim telah memiliki SIMPEG, dan RSOP terkait layanan kepegawaian namun SOP tersebut belum dilegalisasi dan diimplementasikan. SOP Pengelolaan Manajemen Basis Data dan Aplikasi Sistem Informasi SDM. 030/03/MARITIM/ROUM/VI/2016
2	Layanan kerumahtanggaan		V	
3	Layanan persuratan dan kearsipan	V		1. Telah diterbitkan Permenko tentang Tata Naskah Nomor 6 Tahun 2016 2. Telah ditetapkan Permenko No 11 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip
4	Layanan protokoler	V		
5	Layanan administrasi hukum		V	Saat ini telah disusun RPermenko tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
6	Layanan sistem informasi	V		SOP Pelaksanaan Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 022/02/MARITIM/ROIH/VII/2016
7	Layanan administrasi kerjasama	V		Telah terbit Permenko No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
8	Layanan pengelolaan anggaran		V	
9	Layanan pengadaan barang dan jasa	V		SOP Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 048/03/MARITIM/ROUM/VI/2016
10	Layanan persidangan	V		SOP Perumusan Hasil Persidangan/Rapat Koordinasi Yang Dipimpin oleh Menteri Koordinator /Sesmenko 008/02/MARITIM/ROIH/VII/2016
11	Layanan kehumasan	V		Telah terbit Permenko Nomor 8 tahun 2016 tentang SPO Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenko



No	Jenis Layanan	Penerapan Layanan Standar*		Keterangan
		Ada	Tidak	
12	Layanan pengelolaan keuangan		V	Telah disiapkan RPermenko tentang Sistem Akuntansi KPA dan KPB
13	Layanan pengaduan masyarakat	V		Telah terbit Permenko Nomor 8 tahun 2016 tentang SPO Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenko
14	Layanan perijinan perjalanan dinas luar negeri	V		Telah Terbit Permenko Nomor 10 tahun 2016
15	Layanan pengamanan dalam.		V	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	

Kondisi capaian pada triwulan III ini jika dilihat dari jumlah layanan maka belum ada perubahan dibanding triwulan sebelumnya. Namun jika dihitung berdasarkan capaian berbanding target, maka capaian pada triwulan III lebih rendah dari triwulan II. Satu jenis layanan yang belum terealisasi sesuai target pada triwulan III ini adalah Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan. Secara prinsip layanan tersebut sudah jadi, namun belum dikukuhkan/ditetapkan secara resmi dalam bentuk surat keputusan atau peraturannya.

### 3.1.2. Sasaran Program 2

Target Sasaran Program 2 Sekretariat Kemenko Kemaritiman pada Triwulan III TA. 2017 sedikit berbeda dengan triwulan II 2017, yaitu tidak ada IKU.3: Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN. Sehingga dari 5 IKU pada Sasaran Program (SP) ini, pada triwulan III ditargetkan 2 IKU. Berdasarkan target kinerja tersebut, capaian kinerja SP.2 adalah 113,33% dari target. Nilai ini lebih baik dari capaian triwulan I yang terealisasi 110% dari target. Secara rinci target dan capaian kinerja SP2 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja SP.2 Setmenko Triwulan III TA. 2017

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang handal di Kementerian Koordinator	2. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-
	3. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN	-	-	-
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai	95	96,14	101,20
	5. Persentase pengelolaan sumber daya	-	-	-



Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
	berbasis IT			
	6. Jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional	400	2.490	120
<b>Total Capaian</b>				<b>110,60</b>

Jika pada triwulan II capaian kinerja adalah 113,33% dari target, pada triwulan III walau tetap melebihi target, namun terdapat sedikit penurunan menjadi 110,60%. Secara faktual realisasi pada triwulan III ini sama dengan triwulan II, hanya karena ada peningkatan nilai target di IKU.4, maka terjadi penurunan capaian sebesar 2,73%.

Capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Program 2 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman triwulan III 2017 disajikan sebagai berikut:

**1. Indikator Kinerja 2 (IKU.2): Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi**

Untuk triwulan III, IKU.2 belum ditargetkan dicapai. Direncanakan akan ditargetkan pada akhir tahun.

**2. Indikator Kinerja 3 (IKU.3): Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan Keuangan dan BMN**

Untuk triwulan III, IKU.3 tidak ditargetkan dicapai. Direncanakan akan ditargetkan kembali pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV).

**3. Indikator Kinerja 3 (IKU.4): Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan seluruh pegawai**

Kondisi pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pegawai sampai akhir triwulan II TA. 2017 jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan II tidak ada perubahan realisasi pengadaan sarana/prasarana. Namun karena ada perubahan nilai target dari 85% pada triwulan II menjadi 95 pada triwulan III, maka terjadi perubahan persentase capaian kinerja. Jika pada triwulan II capaian IKU.4 ini adalah 113,67% dari target maka pada triwulan III turun naik 12,47% menjadi 101,20% dari target.. Rincian capaian target kinerja IKU.4 ini seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase	
1	Ruang Kerja yang sesuai dan layak	100	90	90,00	
2	Kendaraan Dinas	Mobil	94	94	104
		Sepeda Motor	37	37	92,50
3	Meja-Kursi	575	635	110,6	
4	Lemari-Bufet	90	99	110	



No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
5	Komputer	255	235	92,16
6	Laptop/Notebook	140	140	100
7	Printer	129	136	105,43
8	Scanner	25	21	84
9	Proyektor	15	15	100
10	Mesin fotokopi	15	10	66,67
11	Telepon	190	180	94,74
<b>Total</b>				<b>96,14</b>

Walaupun demikian berkaitan dengan penambahan staf, maka masih terdapat beberapa sarana/prasarana yang masih kurang tetapi sangat mendesak untuk disediakan, seperti komputer/laptop, mesin fotokopi dan scanner. Selain itu juga terdapat fasilitas tersebut yang sudah tidak digunakan karena mengalami kerusakan belum diperbaiki, seperti kursi, pesawat telepon dan/atau jaringannya.

Dari capaian tersebut, maka IKU.4 ini sudah melewati target tahunan sejak triwulan II sudah melampaui dari target untuk tahun 2017 yaitu sebesar 90 %. Capaian ini didukung oleh ketersediaan jumlah meja/kursi yang jauh dari target yang dibutuhkan.

#### 4. Indikator Kinerja 4: Persentase Pengelolaan Sumber Daya Berbasis IT

Pada triwulan III TA. 2017, Indikator Kinerja ini belum ditargetkan.

#### 5. Indikator Kinerja 5: Jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional

Pada triwulan II Indikator Kinerja: jumlah pemberitaan di media nasional dan internasional, baik media elektronik maupun media cetak tercapai 2.491 pemberitaan, atau mencapai nilai capaian realisasi maksimal 120% dari target triwulan II sebanyak 600 (kumulatif sejak januari) pemberitaan atau bahkan target tahunan (800 pemberitaan).

Tabel .... Jumlah Pemberitaan Bidang Kemaritiman

No	Bulan	Berita Online Nasional	Berita Cetak Nasional	Berita Cetak Internasional	Jumlah
1	Jan	235	-	-	235
2	Feb	217	141	-	358



3	Maret	412	493	-	905
4	April	455	12	3	470
5	Mei	262	32	-	294
6	Juni	207	22	-	229
<b>Jumlah Total</b>					<b>2.491</b>

Berkaitan dengan jumlah capaian yang jauh di atas target, maka untuk IKU.5 ini disarankan untuk dilakukan revaluasi target, baik dari sisi target jumlah, maupun sisi substansi. Sebagai contoh/saran, IKU ini akan lebih baik jika diubah bukan hanya jumlah pemberitaan, namun jumlah pemberitaan positif di bidang kemaritiman.

### 3.1.3. Sasaran Program 3

Sasaran Program 3 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pada triwulan III TA. 2017 hanya ditargetkan 1 buah IKU, yaitu Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun secara lengkap, rincian dari Sasaran Program 3 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
4. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator	10. Persentase Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman	-	-	-
	11. Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	70,07	120
	12. Persentase Komponen Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang memenuhi standar Kementerian Keuangan	-	-	-
<b>Total Capaian</b>				<b>120</b>

Capaian IKU.11 ini seperti yang tercantum dalam di atas, jauh di atas target yang sudah ditetapkan. Faktor pendorong pencapaian target ini adalah keseriusan berbagai pihak di lingkup Kemenko Kemaritiman dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sebagai salah satu unsur utama dalam peningkatan besaran nilai Tunjangan Kinerja menjadikan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat serius dilakukan oleh seluruh staf di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi dalam struktur Kemenko Bidang Kemaritiman terdapat Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi. Bagian inilah yang menjadi motor dan fasilitator pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman.



### 3.2. Realisasi Anggaran

Penghitungan penggunaan anggaran berdasarkan Sasaran Program atau Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Kemenko Bidang kemaritiman belum bisa dilaksanakan. Hal ini terjadi karena dalam perumusan Rencana Kerja (ADIK) dan RKAKL belum sepenuhnya mengacu pada sasaran Program atau IKU. Selain itu juga disebabkan karena beberapa unit/bagian belum dapat menyusun penggunaan anggaran berdasarkan target kinerja Setmenko. Dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan dana, masih menitikberatkan penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan pada target kegiatan/kinerja masing-masing Biro/Bagian

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan II Sekretariat Kemenko Kemaritiman

No	Kode Akun	Luaran (Output)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	5601.951	Layanan Internal (Overhead)	5.697.651.000	1.069.036.550	4,16
2	5601.954	Layanan Manajemen SDM	4.401.233.000	515.610.809	11,72
3	5601,995	Layanan Manajemen Keuangan	5.600.000.000	2.343.279.725	41,84
4	5601,956	Layanan Manajemen BMN	720.075.000	356.289.706	49,48
5	5601,959	Layanan Protoker	19.177.798.000	12.661.043.811	64,02
6	5601,962	Layanan Umum	3.431.543.000	904.433.307	26,36
7	5601,994	Layanan Perkantoran	76.051.472.000	38.053.554.750	50,05
8	5602,001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	1.609.749.000	594.892.192	36,96
9	5602,952	Layanan Perencanaan	4.425.000.000	3.543.789.035	80,09
10	5602,953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.925.000.000	852.909.102	44,31
11	5602,961	Layanan Reformasi Birokrasi	4.269.793.000	1.692.772.440	39,65
12	5603,001	Layanan Persidangan	1.333.095.000	304.437.710	22,86
13	5603,957	Layanan Hukum	1.058.644.000	204.437.710	19,31
14	5603,958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	5.204.645.000	2.133.029.313	40,98
15	5603,001	Layanan Data dan Informasi	6.573.809.000	1.091.933.808	16,61
16	5604,001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2.448.526.000	1.125.044.004	45,95
17	5748,001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman	900.000.000	0	0,00
<b>Total Capaian</b>			<b>165.428.033.000</b>	<b>67.457.590.769</b>	<b>40,77</b>



Berdasarkan pada realisasi pengeluaran/pemakaian keuangan Setmenko Bidang Kemaritiman seperti dalam tabel di atas, terlihat bahwa sampai dengan akhir triwulan III telah terealisasi sebesar 40,77%. Nilai ini di bawah target realisasi triwulan III sebesar 60%. Sehingga capaian realisasi keuangan adalah 67,95% dari target.

Jika nilai realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja (108,61%), maka penggunaan dana dapat dianggap sangat efektif. Dapat diinformasikan juga jika realisasi penggunaan dana (untuk kegiatan) sebenarnya adalah lebih dari 40,77%, karena nilai 40,77% adalah nilai riil yang sudah SP2D (disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sementara diperkirakan masih cukup banyak dokumen penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum disetujui atau bahkan diajukan ke KPPN atau bendahara.

Beberapa sebab rendahnya realisasi yang belum menyentuh angka 50% pada triwulan III, dikarenakan masih terdapat anggaran pengadaan barang dan jasa yang belum digunakan, seperti untuk pengadaan sarana perkantoraan dan pembangunan gedung parkir yang terkendala perijinan dari Dinas Tata Kota. Selain itu pagu anggaran untuk gaji dan tunjangan kinerja pun belum terpakai semua dikarenakan masih belum terpenuhinya jumlah pegawai (PNS) sebagaimana dalam perencanaan anggaran



## IV. PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Sekretariat Kemenko Kemaritiman menyusun Laporan Kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun 2017. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Sekretariat Kemenko Kemaritiman sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang..

Pencapaian kinerja Setmenko Triwulan III Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman adalah 108,61% dengan rincian untuk setiap Sasaran Program (SP):
  - a. SP 1: Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan tercapai 66,67% atau 95,24% dari target
  - b. SP 2: Terwujudnya pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang handal di Kementerian Koordinator tercapai 110,60% dari target
  - c. SP 3: Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja kementerian Koordinator tercapai 120%.
2. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
  - a. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing SDM pelaksana;
  - b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
  - c. Dukungan sarana dan prasarana dan anggaran.
  - d. Target yang ditetapkan realistik untuk dapat dicapai
3. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:
  - a. Belum adanya unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko
  - b. Masih adanya pemahaman yang belum sama dalam hal pengadministrasian keuangan dan pelaporan kegiatan.
  - c. Minimnya jumlah tenaga pegawai Kemenko bidang kemaritiman.
  - d. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.



- e. Masih adanya hambatan koordinasi dengan Deputi-Deputi, pemahaman kementerian dan instansi lain pada tugas dan fungsi Kemenko Kemaritiman belum mendalam, sehingga fungsi koordinasi belum berjalan efektif.
4. Untuk peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah:
- a. Penugasan unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko, dengan memaksimalkan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Sesmenko
  - b. Pengisian SDM dengan status PNS dan penempatan sesuai nomenklatur jabatan.
  - c. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*error*);
  - e. Melaksanakan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban sesuai jadwal (tepat waktu)
  - f. Dalam perencanaan target, khususnya pada IKU no 4 dan 6, agar dapat dievaluasi ulang, sehingga target yang ditetapkan layak, tidak terlalu rendah dan disesuaikan dengan kapasitas unit kerja dalam mencapainya.



## LAMPIRAN

### DRAFT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

---

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc**

Jabatan : Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Luhut B. Pandjaitan**

**Ridwan Djamaluddin**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Prima Kesekretariatan	Persentase Penerapan Standar Pelayanan kesekretariatan	50%
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Keuangan, BMN serta Hukum dan Kelembagaan yang Handal di Kementerian Koordinator	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	50%
	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Kebutuhan Seluruh Pegawai	90%
	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Berbasis IT	100%
	Jumlah Pemberitaan Kementerian di Media Nasional dan Internasional	900
Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator	Persentase Penerapan SAKIP Lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman	100%
	Nilai PMPRB Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35
	Persentase Komponen Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Memenuhi Standar Kementerian Keuangan	60%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp.133.928.033.000 ,-
2	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 13.000.000.000,-
3	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	Rp. 15.000.000.000,-
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	Rp. 3.500.000.000,-
5	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp. 2.000.000.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 167.428.033.000,-</b>

Jakarta, Januari 2017

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman RI

Sekretaris Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman

**Luhut B Pandjaitan**

.....,

